

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis merupakan keadaan atau situasi yang merupakan titik balik yang dapat membuat suatu keadaan bertambah baik ataupun keadaan bertambah buruk. Krisis global yang bermula pada Oktober 2008 lalu sebenarnya bukan merupakan krisis yang pertama terjadi di dunia internasional. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 ini berawal dari krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Krisis keuangan di Amerika Serikat yang terjadi pada awal dan pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakatnya yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 2009. Bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut sepanjang tahun 2009. Kebijakan Bank Indonesia di bidang Perbankan diarahkan untuk memperkuat daya tahan

industri Perbankan dengan tetap melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan peran intermediasi Perbankan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Muhammad, 2005:262). Oleh karena itu, bank berkewajiban untuk selalu menyalurkan dana yang dihimpun untuk diinvestasikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudhorib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Sistem bagi hasil

yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan debitur.

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah

BUS	2009	2010	2011	2012	2013
NPF	3.99%	3.02%	2.25%	2.22%	2.96%
CAR	11.34%	16.24%	16.63%	14.13%	14.19%
FDR	89.70%	89.67%	88.94%	100.00%	103.03%
Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1950
Asset	33.37%	47.56%	4.61%	50.50%	50.50%

Sumber : Statistik Bank Indonesia Tahun 2009-2013

Dari data statistik di atas yang terdapat pada Bank Indonesia, perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sampai akhir 2012 menunjukkan peningkatan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Komitmen perbankan syariah untuk menggerakkan sektor riil tidak saja diimplementasikan dengan cukup baik, namun juga diusahakan terus-menerus dalam mengoptimalkan pencapaiannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapatkan perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 78,72% (Statistik Perbankan BI) aktiva perbankan syariah atau Rp 96,62 triliun diinvestasikan kedalam sektor ini.

Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu

kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap permodalan bank (Karim, 2010:255). Salah satu risiko yang dialami oleh bank syariah adalah risiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Tabel 1.2

<i>Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah</i>		
Periode	NPF	
	Nominal	%
2009	1.882	4.01%
2010	2.061	3.02%
2011	2.558	2.52%
2012	3.369	2.22%
2013	5,302	2,96%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah BI 2009-2013

Dari data statistik yang tercantum dalam tabel dapat diketahui terjadi penurunan NPF dari tahun 2009 sebesar 4,01% menjadi 2,96% pada tahun 2013. Berdasarkan tingkat penurunan NPF yang cukup tinggi, maka menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

NPF setidaknya menimbulkan permasalahan bagi pemilik dana (bank) dan pemilik deposito. Pertama bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi NPF mereka tidak menerima *return* pasar dari modal mereka. Kedua untuk pemilik

deposito tidak menerima *return* pasar dari deposito atau tabungan mereka. Akibat tingginya NPL (*non performing loan*), atau NPF di perbankan syariah, perbankan harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan.

NPF menjadi salah satu ukuran atas kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis dan berdampak timbulnya masalah likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selain itu, kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2010:123).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya ada banyak, baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi, artinya bank tersebut mampu menutupi risiko pembiayaan yang

terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Adapun salah satu sumber dana bank adalah dana asing yaitu dana yang bersumber dari dana pihak ketiga. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan.

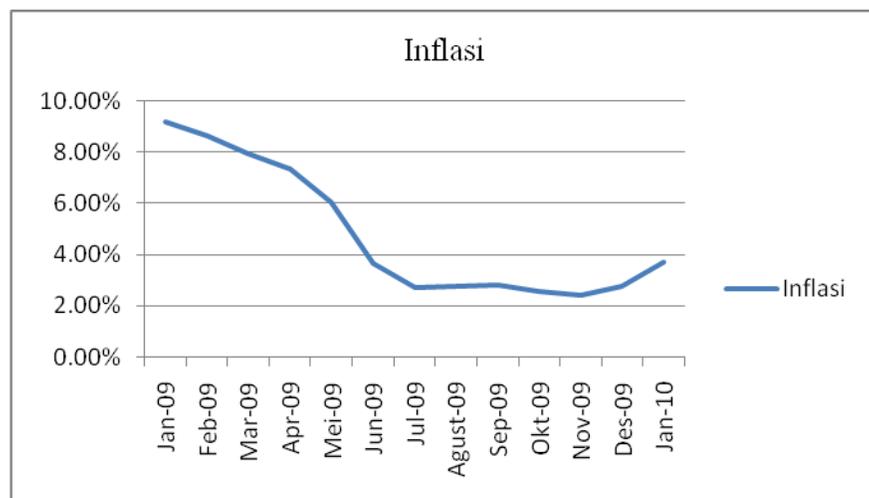
Dan melihat semakin majunya perkembangan perbankan syariah yang hampir semua memperluas jaringan kantor dalam rangka menjaga posisi *share* industri mereka, maka implikasinya adalah kecenderungan peningkatan modal yang diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk menjaga kecukupan CAR-nya. Mengingat perluasan kantor, yang diharapkan akan berkorelasi positif pada peningkatan DPK (dana pihak ketiga) akan membutuhkan modal yang memadai.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank, dalam hal ini dana pihak ketiga. Besarnya FDR sebuah bank, mampu menggambarkan besarnya peluang munculnya pembiayaan bermasalah. Artinya semakin tinggi FDR sebuah bank, maka semakin tinggi pula peluang risiko pembiayaan yang akan terjadi.

Sedangkan dari faktor eksternal bank sendiri yaitu inflasi dan suku bunga *BI Rate*. Inflasi merupakan suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi

kenaikan harga-harga secara umum. Dalam dunia perbankan khususnya dalam pembiayaan, inflasi akan memberikan pengaruh cukup besar. Tingkat inflasi yang tinggi akan berakibat terhadap turunnya pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perbankan yaitu dari tingkat pengembalian pinjaman atau pembiayaan.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Inflasi



Sumber: Statistik BI tahun 2009 diolah dengan excel

Laju inflasi sepanjang tahun 2009 yang jauh dibawah batas target atau sebesar 2,78%. Laju inflasi ini tercatat merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Sebelumnya, pemerintah menargetkan laju inflasi sepanjang 2009 mencapai 4,5%. Dari tahun ke tahun laju inflasi mengalami peningkatan, mengingat semakin besar konsumsi masyarakat yang sebagian besar bahan pangan yang menjadi penyumbang tingginya inflasi.

Selain itu tingkat suku bunga dan bagi hasil akan sangat mempengaruhi keputusan calon nasabah dalam menentukan pilihan dimana ia menyimpan dananya atau mengambil pembiayaan. Apabila bunga kredit konvensional meningkat, maka cenderung akan berpaling pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan mencoba meneliti lebih lanjut penelitian diatas, dengan judul **“Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah?
4. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.
4. Untuk menguji pengaruh *BI rate* terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi *non performing financing* (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Permata Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah. Periode penelitian 2009-2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini dibatasi pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *BI rate*, dan Inflasi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti : Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi Praktis : Menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam mengambil keputusan berkaitan risiko pembiayaan agar bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank : Dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkannya dalam praktik perbankan khususnya berkenaan dengan tema perbankan syariah dan pembiayaan bermasalah.